



BUPATI PESISIR BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengalokasikan dana kepada Pekon yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon, dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus merupakan Alokasi Dana Pekon (ADD/P);
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Pekon (ADD/P) untuk masing-masing Pekon penetapannya dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADD/P).
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Pejabat Bupati Pesisir Barat .
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat .
5. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat .
6. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADD/P, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Lembaga Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Pekon, yang selanjutnya disebut BUM Pekon, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
13. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
14. Keuangan Pekon adalah semua Hak dan Kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon .
15. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
16. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADD/P, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
19. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD/P, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD/P adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Pekon.
20. Bendahara Pekon adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.

21. Tim Pelaksana ADD/P adalah Tim yang ditetapkan oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan ADD/P.
22. Tim Fasilitasi ADD/P adalah Tim yang usulkan oleh Camat, untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD/P di tingkat Pekon .
23. Tim Fasilitasi ADD/P adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD/P tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan ADD/P;
- b. memberikan pedoman kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD/P;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD/P .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD/P;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD/P;
- c. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD/P.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber dan Besaran ADD/P;
- b. Pengalokasian ADD/P;
- c. Pengelolaan ADD/P;
- d. Penyaluran ADD/P;
- e. Penggunaan ADD/P;
- f. Perubahan penggunaan ADD/P;
- g. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD/P;
- h. Pembinaan dan pengawasan ADD/P.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD/P

Pasal 5

- (1) Sumber ADD/P berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD/P adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus setiap Tahun Anggaran.
- (3) Besaran ADD/P untuk masing-masing Pekon, setiap Tahun Anggaran ditetapkan oleh Bupati

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD/P

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD/P mempertimbangkan indikator variabel :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon dan tingkat kesulitan geografis Pekon.
- (2) ADD untuk masing-masing Pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P secara proposional untuk setiap Pekon berdasarkan Angka Bobot Pekon (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP).
- (4) Pemberian ADD/P secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADD/P yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Penghasilan tetap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM).
- (5) Perbandingan pemberian ADD/P secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADDP) dan 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran ADD/P yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Pekon berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan Komponen Variabel (ADDP).
- (7) Angka Bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah Pekon (LW) x 10%;
 - b. Jumlah Penduduk Pekon (JP)x25%;
 - c. Jumlah Penduduk Miskin Pekon (35%);dan
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Pekon (TKG) x 30%.
- (8) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing Pekon dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 - a. Pagu ADD Kabupaten
 - Total Pagu – Kebutuhan Siltap
 - Sisa Pagu Kabupaten dibagi berdasarkan Penghitungan sebagaimana dimaksud Ayat 5, dengan rumusan sebagai berikut:
$$W=(0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon Setiap Pekon.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total Penduduk Pekon.

- Z2 = rasio Penduduk miskin Pekon setiap pekon terhadap total penduduk miskin pekon.
Z3 = rasio Luas wilayah setiap pekon terhadap total Luas wilayah Kabupaten.
Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Georafis Pekon terhadap total TKG Kabupaten.
Z merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas pembangunan daerah

Pasal 8

Selanjutnya mekanisme dan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Pekon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat .

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 02 Maret 2016

BUPATI/PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 02 Maret 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TANGGAL : 02 Maret 2016
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN ALOKASI DANA PEKON MASING - MASING PEKON SE KABUPATEN PESISIR BRAT

NO	Id. Pekon	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Pekon	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)		(6)
I	18.13.01	PESISIR TENGAH				
1	18.13.01.2001	WAY REDAK	178,548,250	71,419,300	71,419,300	35,709,650
2	18.13.01.2002	SERAY	200,824,820	80,329,928	80,329,928	40,164,964
3	18.13.01.2003	KAMPUNG JAWA	221,727,594	88,691,038	88,691,038	44,345,519
4	18.13.01.2004	RAWAS	202,815,173	81,126,069	81,126,069	40,563,035
5	18.13.01.2006	SUKA NEGARA	185,552,726	74,221,090	74,221,090	37,110,545
6	18.13.01.2007	PAHMUNGAN	184,674,025	73,869,610	73,869,610	36,934,805
		JUMLAH	1,174,142,588	469,657,035	469,657,035	234,828,518
II	18.13.02	PESISIR SELATAN				
1	18.13.02.2001	NEGERI RATU TENUMBANG	167,173,811	66,869,525	66,869,525	33,434,762
2	18.13.02.2002	SUKARAME	167,173,811	66,869,525	66,869,525	33,434,762
3	18.13.02.2003	PELITA JAYA	171,688,821	68,675,529	68,675,529	34,337,764
4	18.13.02.2004	SUMUR JAYA	202,175,285	80,870,114	80,870,114	40,435,057
5	18.13.02.2005	TANJUNG JATI	149,461,209	59,784,484	59,784,484	29,892,242
6	18.13.02.2006	PAGAR DALAM	151,496,444	60,598,578	60,598,578	30,299,289
7	18.13.02.2007	TANJUNG SETIA	187,753,127	75,101,251	75,101,251	37,550,625
8	18.13.02.2008	BIHA	208,618,233	83,447,293	83,447,293	41,723,647
9	18.13.02.2009	WAY JAMBU	188,628,151	75,451,260	75,451,260	37,725,630
10	18.13.02.2010	MARANG	355,092,482	142,036,993	142,036,993	71,018,496
11	18.13.02.2011	TANJUNG RAYA	180,653,909	72,261,564	72,261,564	36,130,782
12	18.13.02.2012	BANGUN NEGARA	185,120,623	74,048,249	74,048,249	37,024,125
13	18.13.02.2013	ULOK MANIK	179,093,087	71,637,235	71,637,235	35,818,617
14	18.13.02.2014	PAKU NEGARA	200,900,888	80,360,355	80,360,355	40,180,178
15	18.13.02.2015	TULUNG BAMBAN	163,531,589	65,412,636	65,412,636	32,706,318
		JUMLAH	2,858,561,470	1,143,424,588	1,143,424,588	571,712,294
III	18.13.03	LEMONG				
1	18.13.03.2001	TANJUNG JATI	158,625,934	63,450,374	63,450,374	31,725,187
2	18.13.03.2002	TANJUNG SAKTI	145,904,160	58,361,664	58,361,664	29,180,832
3	18.13.03.2003	WAY BATANG	167,305,730	66,922,292	66,922,292	33,461,146
4	18.13.03.2004	LEMONG	214,148,577	85,659,431	85,659,431	42,829,715
5	18.13.03.2005	CAHAYA NEGERI	161,167,644	64,467,057	64,467,057	32,233,529
6	18.13.03.2006	MALAYA	220,296,138	88,118,455	88,118,455	44,059,228
7	18.13.03.2007	BAMBANG	169,232,023	67,692,809	67,692,809	33,846,405
8	18.13.03.2008	PAGAR DALAM	185,378,415	74,151,366	74,151,366	37,075,683
9	18.13.03.2009	BANDAR PUGUNG	169,398,591	67,759,436	67,759,436	33,879,718
10	18.13.03.2010	PENENGAHAN	243,506,395	97,402,558	97,402,558	48,701,279
11	18.13.03.2011	RATA AGUNG	204,373,615	81,749,446	81,749,446	40,874,723
12	18.13.03.2012	SUKAMULYA	184,710,704	73,884,282	73,884,282	36,942,141
13	18.13.03.2013	PARDA HAGA	155,853,657	62,341,463	62,341,463	31,170,731
		JUMLAH	2,379,901,581	951,960,633	951,960,633	475,980,316
IV	18.13.04	PESISIR UTARA				
1	18.13.04.2001	KURIPAN	186,223,046	74,489,219	74,489,219	37,244,609
2	18.13.04.2002	PADANG RINDU	156,172,849	62,469,139	62,469,139	31,234,570
3	18.13.04.2003	NEGERI RATU	184,763,236	73,905,294	73,905,294	36,952,647
4	18.13.04.2004	KERBANG DALAM	151,881,965	60,752,786	60,752,786	30,376,393
5	18.13.04.2005	KOTA KARANG	172,640,679	69,056,272	69,056,272	34,528,136
6	18.13.04.2006	BALAM	154,934,591	61,973,836	61,973,836	30,986,918
7	18.13.04.2007	WAY NARTA	150,458,186	60,183,275	60,183,275	30,091,637
8	18.13.04.2008	KERBANG LANGGAR	181,220,818	72,488,327	72,488,327	36,244,164
9	18.13.04.2009	WALUR	178,918,650	71,567,460	71,567,460	35,783,730
10	18.13.04.2010	BATU RAJA	156,324,500	62,529,800	62,529,800	31,264,900
11	18.13.04.2011	PEMANCAR	182,039,119	72,815,648	72,815,648	36,407,824
12	18.13.04.2012	GEDAU	169,714,698	67,885,879	67,885,879	33,942,940
		JUMLAH	2,025,292,339	810,116,935	810,116,935	405,058,468
V	18.13.05	KARYA PENGGAWA				
1	18.13.05.2001	KEBUAYAN	172,436,801	68,974,720	68,974,720	34,487,360
2	18.13.05.2002	WAY NUKAK	196,232,386	78,492,954	78,492,954	39,246,477
3	18.13.05.2003	WAY SINDI	195,623,226	78,249,290	78,249,290	39,124,645
4	18.13.05.2004	PENENGAHAN	215,234,331	86,093,733	86,093,733	43,046,866
5	18.13.05.2005	MENYANCANG	182,605,546	73,042,218	73,042,218	36,521,109
6	18.13.05.2006	LA'AY	173,533,381	69,413,353	69,413,353	34,706,676
7	18.13.05.2007	PENGGAWA V ULU	188,959,204	75,583,682	75,583,682	37,791,841
8	18.13.05.2008	PENGGAWA V TENGAH	191,503,926	76,601,570	76,601,570	38,300,785
9	18.13.05.2009	WAY SINDI UTARA	148,553,295	59,421,318	59,421,318	29,710,659

10	18.13.05.2010	TEBAKAK WAY SINDI	178,069,439	71,227,776	71,227,776	35,613,888
11	18.13.05.2011	WAY SINDI HANUAN	184,753,449	73,901,380	73,901,380	36,950,690
12	18.13.05.2012	ASAHAN WAY SINDI	170,200,179	68,080,072	68,080,072	34,040,036
JUMLAH			2,197,705,164	879,082,065	879,082,065	439,541,033
VI	18.13.06	PULAU PISANG				
1	18.13.06.2001	PASAR PULAU PISANG	173,554,165	69,421,666	69,421,666	34,710,833
2	18.13.06.2002	LABUHAN	168,235,989	67,294,396	67,294,396	33,647,198
3	18.13.06.2003	BANDAR DALAM	158,308,721	63,323,488	63,323,488	31,661,744
4	18.13.06.2004	PEKON LOK	148,288,105	59,315,242	59,315,242	29,657,621
5	18.13.06.2005	SUKADANA	152,914,029	61,165,612	61,165,612	30,582,806
6	18.13.06.2006	SUKA MARGA	151,317,647	60,527,059	60,527,059	30,263,529
JUMLAH			952,618,656	381,047,462	381,047,462	190,523,731
VII	18.13.07	WAY KRUI				
1	18.13.07.2001	PAJAR BULAN	144,379,521	57,751,808	57,751,808	28,875,904
2	18.13.07.2002	BUMI WARAS	161,437,997	64,575,199	64,575,199	32,287,599
3	18.13.07.2003	BANJAR AGUNG	154,218,332	61,687,333	61,687,333	30,843,666
4	18.13.07.2004	PENGGAWA V ILIR	174,843,627	69,937,451	69,937,451	34,968,725
5	18.13.07.2005	ULU KRUI	180,988,006	72,395,202	72,395,202	36,197,601
6	18.13.07.2006	GUNUNG KEMALA	183,777,272	73,510,909	73,510,909	36,755,454
7	18.13.07.2007	LABUHAN MANDI	178,374,361	71,349,744	71,349,744	35,674,872
8	18.13.07.2008	SUKA BARU	184,992,976	73,997,190	73,997,190	36,998,595
9	18.13.07.2009	PENGGAWA LIMA	166,829,197	66,731,679	66,731,679	33,365,839
10	18.13.07.2010	GUNUNG KEMALA TIMUR	175,372,436	70,148,975	70,148,975	35,074,487
JUMLAH			1,705,213,726	682,085,490	682,085,490	341,042,745
VIII	18.13.08	KRUI SELATAN				
1	18.13.08.2001	BALAI KENCANA	187,846,236	75,138,494	75,138,494	37,569,247
2	18.13.08.2002	WAY SULUH	173,703,062	69,481,225	69,481,225	34,740,612
3	18.13.08.2003	WAY NAPAL	171,417,791	68,567,116	68,567,116	34,283,558
4	18.13.08.2004	PADANG HALUAN	180,127,050	72,050,820	72,050,820	36,025,410
5	18.13.08.2005	LINTIK	187,658,389	75,063,355	75,063,355	37,531,678
6	18.13.08.2006	WALUR	164,535,394	65,814,157	65,814,157	32,907,079
7	18.13.08.2006	PEMERIHAN	163,634,773	65,453,909	65,453,909	32,726,955
8	18.13.08.2007	MANDIRI SEJATI	167,855,689	67,142,276	67,142,276	33,571,138
9	18.13.08.2008	PADANG RAYA	173,556,101	69,422,440	69,422,440	34,711,220
10	18.13.08.2009	SUKA JADI	170,129,740	68,051,896	68,051,896	34,025,948
JUMLAH			1,740,464,223	696,185,689	696,185,689	348,092,845
IX	18.13.09	NGAMBUR				
1	18.13.09.2001	SUMBER AGUNG	194,049,222	77,619,689	77,619,689	38,809,844
2	18.13.09.2002	ULOK MUKTI	224,073,959	89,629,583	89,629,583	44,814,792
3	18.13.09.2003	NEGERI RATU NGAMBUR	215,114,870	86,045,948	86,045,948	43,022,974
4	18.13.09.2004	PEKON MON	234,516,324	93,806,530	93,806,530	46,903,265
5	18.13.09.2005	G.C. KUNINGAN	216,672,042	86,668,817	86,668,817	43,334,408
6	18.13.09.2006	SUKA BANJAR	194,054,842	77,621,937	77,621,937	38,810,968
7	18.13.09.2007	SUKA NEGARA	185,283,209	74,113,284	74,113,284	37,056,642
8	18.13.09.2008	MUARA TEMBULIH	162,938,696	65,175,479	65,175,479	32,587,739
9	18.13.09.2009	BUMI RATU	202,072,673	80,829,069	80,829,069	40,414,535
JUMLAH			1,828,775,838	731,510,335	731,510,335	365,755,168
X	18.13.10	BENGKUNAT				
1	18.13.10.2001	NEGERI RATU NGARAS	193,671,646	77,468,658	77,468,658	38,734,329
2	18.13.10.2002	KOTA BATU	187,992,231	75,196,892	75,196,892	37,598,446
3	18.13.10.2003	MJLANG MAYA	192,064,213	76,825,685	76,825,685	38,412,843
4	18.13.10.2004	RAJABASA	167,985,325	67,194,130	67,194,130	33,597,065
5	18.13.10.2005	PARDASUKA	180,166,052	72,066,421	72,066,421	36,033,210
6	18.13.10.2006	PADANG DALAM	168,274,594	67,309,838	67,309,838	33,654,919
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	203,966,192	81,586,477	81,586,477	40,793,238
8	18.13.10.2008	SUKARAME	183,430,068	73,372,027	73,372,027	36,686,014
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	154,182,201	61,672,881	61,672,881	30,836,440
JUMLAH			1,631,732,522	652,693,009	652,693,009	326,346,504
XI	18.13.11	BENGKUNAT BELIMBING				
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	285,489,147	114,195,659	114,195,659	57,097,829
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	212,167,472	84,866,989	84,866,989	42,433,494
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	223,037,575	89,215,030	89,215,030	44,607,515
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	239,945,222	95,978,089	95,978,089	47,989,044
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	202,593,036	81,037,214	81,037,214	40,518,607
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	253,493,679	101,397,471	101,397,471	50,698,736
7	18.13.11.2007	WAY HARU	248,792,293	99,516,917	99,516,917	49,758,459
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	236,053,328	94,421,331	94,421,331	47,210,666
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	222,344,826	88,937,931	88,937,931	44,468,965
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	212,839,075	85,135,630	85,135,630	42,567,815
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	201,253,495	80,501,398	80,501,398	40,250,699
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	203,523,346	81,409,338	81,409,338	40,704,669
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	236,985,511	94,794,204	94,794,204	47,397,102
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	185,377,196	74,150,879	74,150,879	37,075,439
JUMLAH			3,163,895,201	1,265,558,080	1,265,558,080	632,779,040
JUMLAH TOTAL I s.d XI			21,658,303,308	8,663,321,323	8,663,321,323	4,331,660,662

BUPATI PESIKIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

No.	Nama Desa	Kebutuhan Sitaap	Alokasi Dasar A/DMA	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Amanah Pemerintah			Amanah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				OP	KVP	Bobot JP	KG	VK	Bobot PMK	Kru1	Rasio Luas Wilayah	Bobot LW	(D-Kab)	VK	Bobot IKG			
30	25%		am	35%		al	10%		al	30%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (3) + (4) + (18)
XI	B. BELIMBING																	
1	PAGAR BUKIT	138,000,000	49,695,232	4,353	0.03072	0.00768	741	0.03000	0.01050	121.12	0.04181	0.00418	72.73	0.01029	0.00309	0.02545	97,793,916	285,489,147
2	TANJUNG KEMALA	123,000,000	49,695,232	1,289	0.00910	0.00227	231	0.00935	0.00327	75.43	0.02602	0.00260	50.00	0.00707	0.00212	0.01027	39,472,240	212,167,472
3	SUKAMARGA	115,500,000	49,695,232	2,911	0.02054	0.00514	388	0.01571	0.00550	43.59	0.01504	0.00150	68.67	0.00971	0.00291	0.01505	57,842,343	223,037,575
4	KOTA JAWA	130,500,000	49,695,232	2,365	0.01669	0.00417	489	0.01980	0.00693	57.82	0.01994	0.00199	57.78	0.00817	0.00245	0.01555	59,749,990	239,945,222
5	PENYANDINGAN	115,500,000	49,695,232	1,738	0.01227	0.00307	199	0.00806	0.00282	36.29	0.01252	0.00125	61.11	0.00864	0.00258	0.00973	37,397,804	202,593,036
6	BANDAR DALAM	145,500,000	49,695,232	2,143	0.01512	0.00378	449	0.01818	0.00636	56.26	0.01941	0.00194	72.73	0.01029	0.00309	0.01517	58,298,447	253,493,679
7	WAY HARU	153,000,000	49,695,232	1,712	0.01208	0.00302	393	0.01591	0.00557	42.02	0.01449	0.00145	46.11	0.00652	0.00196	0.01199	46,097,061	248,792,293
8	PEMERIHAN	123,000,000	49,695,232	2,259	0.01594	0.00399	380	0.01538	0.00538	117.12	0.04040	0.00404	72.50	0.01026	0.00308	0.01649	63,358,097	236,053,328
9	SUKANEGERI	130,500,000	49,695,232	1,414	0.00998	0.00249	302	0.01223	0.00428	55.29	0.01907	0.00191	53.89	0.00762	0.00229	0.01097	42,149,595	222,344,826
10	SUMBEREJO	123,000,000	49,695,232	1,332	0.00940	0.00235	265	0.01073	0.00375	64.33	0.02219	0.00222	50.00	0.00707	0.00212	0.01045	40,143,843	212,839,075
11	SIRING GADING	130,500,000	49,695,232	800	0.00565	0.00141	164	0.00664	0.00232	9.57	0.00330	0.00033	33.33	0.00471	0.00141	0.00548	21,058,263	201,253,495
12	WAY TIAS	130,500,000	49,695,232	665	0.00469	0.00117	183	0.00741	0.00259	20.32	0.00701	0.00070	37.78	0.00534	0.00160	0.00607	23,328,114	203,523,346
13	TANJUNG REJO	138,000,000	49,695,232	2,077	0.01466	0.00366	313	0.01267	0.00443	75.51	0.02605	0.00260	50.00	0.00707	0.00212	0.01283	49,290,279	236,985,511
14	PAGAR BUKIT INDUK	100,500,000	49,695,232	810	0.00572	0.00143	238	0.00963	0.00337	38.57	0.01331	0.00133	71.23	0.01008	0.00302	0.00915	35,181,965	185,377,196
	Total	12,060,000,000	5,764,646,880	141,698	1	0.25	24,703	1	0.35	2,899	1	0.10	7,069.18	1	0.30	1	3,843,097,920	21,667,744,800

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	21,667,744,800
Kebutuhan Sitaap	12,060,000,000
Stor Pagu = Total - Sitaap	9,607,744,800
Alokasi Dasar (60%)	5,764,646,880
Pagu Bagian Formula (40%)	3,843,097,920
Jumlah Desa	116

Bobot	
JP	0.2500
AK	0.3500
LW	0.1000
IKG	0.3000

Pejabat berwenang dan bertanggung jawab

PPTK

Kru1, 2016

Petugas Penghitung Dana Pekon

HUSNI ARIFINS.IP
NIP.19650614 198603 1 008

AHMAD ZAINI S.IP
NIP.19720304 200604 1 010

RIFWAN PUSPA WIJAYA S.Sos
NIP. 19830604 200804 1 001